

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak, contoh aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya. Dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah. Sarana dan prasarana merupakan kelengkapan dan kemudahan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun dipelihara dan dijaga dengan baik serta digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan dinas ataupun kepentingan dalam melayani masyarakat.

Aset memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat terstruktur mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian.

Salah satu aset atau alat pendukung yang sangat penting bagi kelancaran tugas-tugas operasional di luar kantor, yaitu kendaraan dinas. Aset ini sangat berguna untuk mendukung kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu, pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah baik provinsi maupun daerah perlu diselenggarakan. Untuk itu perlu diingat ada beberapa faktor

penentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Faktor penentunya ada 4 (empat) antara lain adalah :

1. Faktor manusia (sebagai subyek penggerak faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan daerah.
3. Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan daerah.
4. Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen.

Keempat faktor ini harus berjalan bersama dan saling berhubungan. Dalam penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan baik ditingkat provinsi ataupun daerah. Di Kota Bukittinggi sendiri yang merupakan bagian dari kabupaten/kota yang berada di Sumatera Barat juga harus mampu menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan melihat dan menerapkan keempat faktor yang ada dengan secara bersamaan dan saling berhubungan tanpa kemampuan manusia, keuangan, peralatan maupun organisasi dan manajemen yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik. Oleh sebab itu, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini dituntut dari para penyelenggara pemerintah daerah khususnya di Daerah Kota Bukittinggi.

Kendaraan dinas merupakan salah satu fasilitas negara yang disediakan kepada pejabat dan sarana operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut dengan SKPD.

Tujuannya antara lain agar pejabat ataupun tenaga operasional lainnya dalam melakukan kegiatan atau aktivitas, dinas sehari-hari dapat lebih cepat dan lancar. Dengan demikian, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga dapat berjalan dengan lancar dan terarah.

Penggunaan mobil dinas dalam praktek pengadaan sarana mobil dinas pada prinsipnya adalah dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan terhadap publik (warga masyarakat). Pemanfaatan mobil dinas tidak jarang beralih fungsi sebagai mobil pribadi para pemegangnya tentu menguntungkan bagi orang yang mendapatkan jatah mobil. Kebutuhan mobil dinas tentunya tidak hanya sebatas membeli bensin, tapi juga terkait dengan servis, ganti onderdil, sampai perbaikan beragam kerusakan kendaraan, termasuk bila terjadi kecelakaan.

Kenyataannya yang ada dalam penggunaan kendaraan dinas Pegawai Negeri Sipil instansi tertentu di daerah maupun di pusat sangatlah memprihatinkan, hal ini lebih nyata dan jelas terlihat lagi di daerah. Contoh masalah yang ada adalah penggunaan kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil diluar kegiatan dinas. Praktek pelanggaran cenderung terjadi karena rendahnya kesadaran dari individu Pegawai yang telah diserahkan tanggung jawab untuk menggunakan kendaraan dinas yang diberikan kepadanya dan tidak jelasnya masalah mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

Tingkat kebutuhan pegawai dalam pemanfaatan fasilitas kantor yang disediakan sangatlah besar. Selain mendukung ketepatan waktu bekerja, juga penyelenggaraan administrasi kantor yang melibatkan kantor atau instansi-instansi lain yang saling bekerjasama dalam pelayanan ketatausahaan atau urusan kedinasan. Berdasarkan tingkat kebutuhan pegawai akan fasilitas kendaraan dinas, dan ketepatan waktu dalam bekerja disertai tingkat volume

pekerjaan yang semakin padat, maka alat transportasi berupa kendaraan dinas dan operasional perlu mendapat perhatian khusus. Jika tidak dibarengi dengan fasilitas kendaraan untuk menunjang semua pekerjaan kantor, maka akan memperlambat efektifitas dalam bekerja dan mengurangi ketepatan waktu untuk target yang hendak dicapai tidak terwujud.

Hal ini akan merugikan instansi pemerintah itu sendiri. Pada dasarnya fasilitas aset kendaraan sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan, namun pada kenyataannya seringkali ditemui masalah baik itu kurangnya penyediaan aset kendaraan maupun sudah tersedianya aset kendaraan tetapi tidak didukung oleh proses pemeliharaan yang baik. Aset-aset tersebut tidak terpakai efisiensinya sehingga nilai kerusakannya akan semakin parah jika tidak di pergunakan atau tidak diperhatikan pemeliharaannya dengan baik.

Beberapa tahap pengelolaan aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset, dimana jika kelima tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang tertib, akuntabel dan transparan.

Di kota Bukittinggi sendiri daftar mengenai aset badan keuangan daerah atau BKD kota Bukittinggi sendiri dapat diakses di situs SIKEDA Bukittinggi yang disediakan oleh pemerintah kota. Dari berbagai jenis aset yang ada di BKD kota bukittinggi ini yang paling umum dan paling sering kita jumpai adalah kendaraan dinas, yang pada umumnya ditandai dengan plat nomor kendaraan berwarna merah, kendaraan dinas di sini digunakan untuk keperluan dinas atau keperluan operasional yang menyangkut kepada pekerjaan, namun sering kita jumpai kendaraan

dinas berkeliranan untuk kepentingan pribadi di luar jam dinas atau di luar jam kerja.

Bahkan terkadang dapat kita temui kendaraan dinas berada di tempat yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan seperti di tempat wisata dan lain sebagainya, kendaraan dinas bukanlah digunakan untuk keperluan pribadi karena kendaraan dinas biaya perawatan dan pemeliharannya menggunakan dana APBN/APBD jadi tidak tepatlah rasanya jika kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi. Di kota Bukittinggi pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dalam peraturan daerah kota Bukittinggi nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk menulis analisis pengelolaan aset daerah pada badan keuangan daerah kota Bukittinggi. Pembahasan ini hanya berfokus pada satu jenis aset yaitu pada aset bergerak berupa kendaraan dinas yang dimana perlu ditinjau pada pengelolaan menurut Peraturan Daerah kota Bukittinggi nomor 1 Tahun 2019 terutama pada bagian pemeliharannya.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah Pengelolaan Aset Daerah khusus pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kota Bukittinggi ?

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset daerah khusus pada Biro pengelolaan barang dan aset daerah kota bukittinggi khusus untuk kendaraan dinas.

1.3 Manfaat Magang

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan di tempat kerja mengenai dunia kerja.
- b. Mengasah kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi di lingkungan kerja.
- c. Untuk dapat di jadikan sebagai modal pengalaman di surat lamaran kerja kelak.
- d. Memperoleh data-data yang di gunakan sebagai faktor penunjang dalam pembuatan tugas akhir.
- e. Untuk memenuhi mata kuliah magang di Fakultas Ekonomi Program Studi Keuangan, Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat.

2. Bagi Perusahaan

- a. Perusahaan mendapat bantuan dari tenaga mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek magang.
- b. Sebagai gambaran bagi perusahaan untuk menilaipotensi kinerja magang, apabila suatu saat perusahaan ingin merekrut mahasiswa tersebut menjadi karyawan.
- c. Adanya kerja sama antar dunia pendidikan dengan perusahaan sehingga perusahaan tersebut terkenal oleh kalangan akademis.

3. Bagi Universitas



- a. Terjadi Kerja sama dengan perusahaan
- b. Dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengalaman kerja magang.
- c. Sebagai evaluasi untuk menyempurnakan bahan ajar dimasa yang akan datang.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis membatasi pembahasan yang berhubungan tentang Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi.

1.5 Tempat Dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini akan penulis lakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi. Kegiatan ini di rencanakan berlangsung selama 40 hari dari tanggal 27 mei s/d 27 juli 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis Memberikan sistematika penulis dengan pembahasan .Adapun sistematika tersebut meliputi:



BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, dan sistematika laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pengertian aset, pengelompokan aset daerah, Fungsi aset daerah, manfaat aset daerah, ruang lingkup aset daerah, prinsip dasar pengelolaan aset daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya Badan Keuangan Daerah dan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah, visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, struktur organisasi.

BAB VI PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil studi selama di Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, yang menyangkut tentang pengelolaan Aset Daerah Kota Bukittinggi.

BAB V PENUNTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil kegiatan magang yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak tertentu.

